

*Manajemen Zakat
Infak dan Sedekah*

Tontowi Jauhari

Fakultas Dakwah
IAIN Raden Intan Lampung

**Manajemen Zakat
Infak dan Sedekah**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-979-1335-75-1

Oleh:
Tontowi Jauhari

Cetakan pertama, desember 2011
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:
Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Kelembagaan dakwah dewasa ini dihadapkan pada persoalan lemahnya manajemen kelembagaan yang berakibat pada stagnan diberbagai lembaga dakwah. Secara kuantitas sedikit sekali lembaga dakwah yang mampu survive untuk bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.

Tulisan ini dibuat atas pertimbangan banyaknya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang masih bersifat perorangan dan konvensional sehingga substansi zakat sebagai ibadah yang dijaga oleh keimanan individu, kontrol sosial, dan kekuasaan negara tidak berjalan. Selain itu tulisan ini juga digunakan sebagai buku ajar perkuliahan manajemen ZIS.

Secara sistematis akan menguraikan tentang pengertian, konsep dan sejarah ZIS, sumber, obyek dan mustahik zakat, serta manajemen pengumpulan, distribusi dan pemberdayaan ZIS.

Semoga tulisan singkat dan sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat. Meskipun demikian tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, *Insyallah* akan terus disempurnakan.

Penyusun

Daftar Pustaka

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. MANAJEMEN ZAKAT	
Pengertian Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah	1
Landasan Teologis Zakat	4
Sejarah Zakat	7
Hikmah dan Maanfaat Zakat	21
Manajemen Kelembagaan Zakat	24
II. SUMBER DAN MUSTAHIK ZAKAT	
Sumber Zakat	37
Mustahik Zakat	46
Kalkulator Zakat	50
III. PENGELOLAAN ZAKAT	
Strategi dan Teknik Pengelolaan Zakat	54
Pengumpulan Zakat	57
Administrasi Zakat	59
Pendistribusian Zakat	65
IV. PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH	
Perluasan Kewajiban Zakat	72
Pemberdayaan zakat Infak dan sedekah	74
V. ORGANISASI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH	
Tujuan dan Sasara Pengelolaan Zakat	79
Susunan Organisasi Amil Zakat	82
Pengelolaan Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Amil Zakat	84
Motivasi dan Evaluasi Zakat	92

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/sedekah*, (edt. Hilman dkk), Jakarta, BAZIS DKI, 1999
- Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat*, (edt. Suyitno dkk), Yogya-karta, Pustaka Pelajar, 2005
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001
- Arifin, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, IAIN Raden Intan, 1990
- Bustami A. Gani, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, UII, 1995
- Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Faozan Amar, ed), Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2009
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2002
- Faozan Amar (edt), *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2009
- Gary Yukl, *Leadership in Organization*, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall, 2002
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi; perilaku, struktur dan proses*, Jakarta, Erlangga, 1996
- Gitosudarmo dan Sudita, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta, BPFE, 2000
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2001
- IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, 1990
- Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jakarta, Pustaka Amani, 1986

- Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, *Manajemen*, (terj. T. Hermaya), Jakarta, PT Prenhallindo, 1999
- Sukanto Reksohadiprojo, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, BPFE UGM, 1986
- Suyitno.dkk (edt), *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Weston & Copeland, *Manajemen Keuangan*, (terj. Jaka Wasana dkk), Jakarta, Erlangga, 1999
- Yusuf Al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (terj. Setiawan Budi Utomo), Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Yusuf Qaradhwawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (terj. Sari Narulita), Jakarta, Zikrul Hakim, 2005

I. MANAJEMEN ZAKAT

Pengertian Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah

Kecakapan dalam pengelolaan sebuah organisasi, badan, lembaga, perusahaan dan lainnya, saat ini menjadi tuntutan dan sangat urgen. Tuntutan akan kecakapan pengelolaan kegiatan dalam sebuah organisasi/lembaga dikenal dengan nama manajemen atau pengelolaan suatu organisasi.

Menurut *encyclopedia of the social science*, manajemen merupakan suatu proses dimana suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi. George R. Terry mengatakan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.¹

Sukanto Reksohadiprojo mendefinisikan manajemen merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien.² Sedangkan Robbins dan Coulter, mendefinisikan manajemen merupakan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain.³

Beberepa definisi manajemen tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang menggambarkan fungsi dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan secara integrited

dan berkesinambungan dengan mengacu pada hubungan antara masukan dan keluaran agar efektif dan efisien.

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti, yaitu: *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan - perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Dan dilihat dari istilah (terminologi) zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda,⁵ dan dapat juga dikatakan sebagai siar Islam yang kedua serta pilar sosial finansial utama dari pilar rukun-rukun-Nya yang agung.⁶ Pengertian-pengertian tersebut mensyaratkan bahwa zakat merupakan ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta (finansial) sesuai dengan kadar dan nisabnya serta digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan bersama (ummat).

Infak secara bahasa bermakna *madha wa nafida*, yakni berlalu dan menghabiskan,⁷ atau memberikan belanja kepada mereka yang menjadi kewajibannya (*nafaqah*), untuk memberikan perolehannya serta menghabiskan untuk keperluan mereka, seperti seorang suami kepada istrinya juga ayah kepada anak-anaknya. Kata ini juga tidak hanya dikonotasikan atas pengertian tersebut, anjuran untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dari jalan Allah, juga digunakan kata infak.

Pengertian infak tersebut berarti infak tidak hanya bermakna belanja hanya untuk kepentingan keluarga, tetapi juga pemanfaatan perolehan di jalan Allah, infak sebagai perbuatan mulia tidak dibatasi secara kuantitatif dalam pengeluarannya, tetapi tidak boleh sampai pelaku infak menderita.

Sedangkan sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar lawan dusta, kata ini dalam syariah Islam juga digunakan untuk mengungkapkan harta yang dikeluarkan setiap manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*),⁸ dalam rangka membangun citra ke-Islaman dan ketaqwaan seseorang. Lafat sedekah juga digunakan dalam mengungkapkan zakat, mengingat zakat merupakan perbuatan benar.

Bila dilihat dari sisi hukum infak dan sedekah masing-masing ada dua macam, infak dan sedekah wajib disebut zakat, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik jenis harta maupun ukuran yang dikeluarkannya. infak sunnah tidak ditentukan batas-batasnya, dan dapat dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kekeluargaan, bahkan bisa melebihi alokasi zakat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan pemberi yang dapat berakibat penderitaan. Sedangkan sedekah sunnah adalah mengeluarkan sebagian harta diluar zakat dengan maksud pemberian semata untuk mencari ridla Allah serta untuk mendekatkan diri kepada-Nya, sebagai bentuk perwujudan taat terhadap anjuran-Nya yang tidak mengikat. Bila dilihat dari perbuatannya, sedekah termasuk infak dan bila dilihat dari sifatnya untuk

meningkatkan kualitas taqwa. Secara pragmatis keduanya yakni infak dan sedekah digunakan untuk mengungkapkan pemberian harta diluar zakat.

Dalam batasan-batasan tersebut di atas, manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dimaksudkan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian BAZIS/LAZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Landasan Teologis Zakat

Salah satu pilar pokok Islam sebagai sendi pokok dalam Islam adalah zakat. Karena pentingnya zakat dan shalat Al-Qur'an menyebutnya sebagai lambang seluruh ajaran Islam.

Firman Allah SWT:

فَإِنْ نَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (At-Taubah, 9 : 11).

Zakat merupakan ibadah yang sangat tua, sama halnya dengan shalat yang dibawa melalui risalah kenabian, sebagai ibadah yang dianjurkan para nabi dan sebagai

wasiat yang tergolong utama dari Allah SWT serta sebagai wasiat para nabi kepada umatnya. Mengingat pentingnya perintah zakat, dalam Al-Qur'an disimbolkan sebagai saudara kandung perintah shalat karena dekatnya kedua perintah ini, Al-Qur'an menyebutnya secara berulang-ulang tidak kurang dari dua puluh delapan kali,⁹ seperti dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Al-baqarah, 2 : 3)

Menafkahkan sebagian rezki dimaksudkan adalah untuk memberikan sebagian dari harta yang telah direzkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama untuk memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

Allah SWT juga mensejajarkan shalat dan zakat, seperti dalam firman-Nya surat An-Nisaa' (4 : 77, 162), Al-Anbiyaa' (21 : 73), At-Taubah (9 : 103), Bayyinah (98 ; 5) dan lainnya. Dalam surat At-Taubah (9 : 11) Allah menggambarkan bahwa shalat dan zakat sebagai pelambang seluruh ajaran Islam. Shalat melambangkan hubungan baik dengan Allah dan zakat sebagai perwujudan keharmonisan hubungan sesama manusia.

Keharmonisan hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia, tidak terlepas dari membersihkan dan mensucikan diri, sebagaimana firman Allah SWT:

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah, 9 : 103)

Rasulullah dalam banyak haditsnya juga mengatakan “Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata bahwa Nabi SAW, mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman dan beliau bersabda, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang harus diambil dari orang-orang kaya, dan didistribusikan pada orang-orang fakir” (HR. al-jama’ah).¹⁰ “adalah Rasulullah SAW pada suatu hari duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya “wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi menjawab; Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah).¹¹

Zakat menurut para ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkari berarti kafir dari Islam. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan

Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam/pemimpin (untuk diatur pendayagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin itu adil.¹²

Di Indonesia perintah untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah telah diatur tersendiri dalam berbagai keputusan dan undang-undang, juga dapat dijadikan pijakan operasional pengelolaannya, seperti:

1. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968, tentang pembentukan badan/amil zakat.
2. Intruksi Menteri Agama RI No. 16 Tahun 1989 tentang pembinaan Zakat, Infak dan sedekah.
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri RI Dan Menteri Agama RI No. 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah.
4. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Sejarah Zakat

1. Zakat Pra-Islam

Ketersentuhan agama-agama samawi pra-Islam dalam konteks zakat sudah terjalin sejak lama dalam bentuk prinsip

dan nama, artinya Allah telah mewasiatkan persoalan zakat kepada Rasul-Rasul-Nya untuk disampaikan kepada ummatnya. Wasiat Allah SWT kepada para Rasul, di wasiatkan melalui Firman-Nya:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا

Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (Maryam, 19 : 30-31).

Firman Allah SWT:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami jadikan **orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-**

pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (Al-Anbiyaa, 21 : 72-73).

Firman Allah SWT:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ
رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ
عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya (Maryam, 19 : 54-55).

Zakat juga diperintahkan kepada bani Israil, seperti firman Allah SWT:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ
عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَعَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كَفَرَ لَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ نَقَدْنَا لَكُمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik... (Al-Maidah, 5 : 12).

Kepada Ahli kitab Allah SWT juga mewasiatkan tentang syariat zakat, dalam Firman-Nya:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
 الْبَيِّنَةُ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 نَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat

dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Al-Bayyinah, 98 : 4-5).

Wasiat-wasiat Allah SWT tersebut, sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan zakat sebelum perintah zakat kepada Rasulullah SAW, hanya saja wasiat Allah dalam al-Qur'an masih bersifat global dalam arti al-Qur'an belum memperinci mekanisme pengeluaran, pemungutan dan pemerataan zakat pada Rasul pra-Islam. Yusuf al-Qardhawy mengatakan walaupun zakat sebelum Islam telah ada tetapi sesungguhnya itu hanya sebatas prinsip dan nama, meskipun sesungguhnya secara realitas zakat Islam merupakan suatu sistem yang baru dan unik yang belum pernah dipelopori oleh suatu agama samawi pra-Islam dan hukum konvensional di duniapun. Karena zakat bukan sekedar kebijakan yang terserah kepada keimanan individu dan hati nurani, tetapi zakat ibadah yang dijaga oleh keimanan individu, kontrol sosial, dan kekuasaan Negara.

2. Zakat Pada Masa Rasulullah

Zakat diperintahkan kepada Rasulullah saw sejak beliau masih di Makkah bersamaan dengan perintah shalat, seperti terdapat dalam surat al-Mukminun; 4, ar-Rum; 39, an-Naml; 1-3, Lukman; 2-4. Firman Allah SWT:

طَسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat (an-Naml, 27 : 1-3).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّبُورًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِندَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (ar-Rum, 30 : 39).

Pada periode Makkah zakat hanya sebatas informasi, belum menetapkan kewajiban zakat bagi seorang muslim

baik zakat maal (harta) maupun zakat fitrah. Zakat pada periode ini baru sebatas mencerminkan perilaku yang terpuji bagi orang-orang yang menunaikan zakat, cermin bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertaqwa dan orang yang shaleh. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah diturunkan masih bersifat universal, belum memuat ketentuan-ketentuan detail tentang hukum zakat, jenis harta yang wajib di zakati, nisab dan kadar yang harus dikeluarkan.

Perintah zakat periode Makkah, bila dilihat dari sisi sosiologis dikarenakan kondisi umat Islam yang masih minoritas, belum memiliki harta kekayaan yang berlimpah, kecuali hanya kekuatan iman dan Islam yang melekat di dalam diri jiwa mereka.

Berbeda dengan periode Makkah, periode Madinah umat Islam telah memiliki kekuatan politis, wilayah umat Islam bertambah luas dan membentuk kekuatan mandiri sehingga diperlukan adanya pranata untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik. Karena kondisi sosiologis yang semakin membaik inilah pada periode Madinah ayat-ayat mulai menunjukkan unsur kewajiban zakat.

Lebih jauh pada tahun kedua hijriyah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat, telah mulai secara khusus menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq: fakir dan miskin).

Firman Allah SWT:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
 الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-Baqarah, 2 : 271).

Penetapan mustahiq zakat (fakir dan miskin) sampai pada tahun ke-sembilan hijriyah dengan turunnya surat at-Taubah, 9 : 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Setelah turun surat at-Taubah ayat 60, bukan serta merta mustahiq zakat pada zaman Rasulullah menerima zakat secara rata (tidak dibagi rata), tetapi dari delapan kelompok dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk mempermudah pemungutan dan penyaluran zakat dibentuk petugas (amil) yang dibagi dua, dalam kota Madinah bersifat *free-lance* tidak memperoleh gaji tetapi terkadang memperoleh honorarium dan di luar kota Madinah, status amil sebagai wali (pemerintah daerah) yang merangkap sebagai amil, seperti Muaz bin Jabal.¹³

3. Zakat Pada Masa Khulafarrasyidin

Pengelolaan zakat pada periode khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah. Pembangkangan masyarakat terhadap perintah membayar zakat terjadi diberbagai wilayah umat muslim, pembangkangan ini dapat dilihat dari cara memahami makna surat at-Taubah, 9:103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Mereka beranggapan bahwa yang berhak memungut zakat hanya Rasulullah, karena beliau yang diperintahkan menarik zakat dan beranggapan hanya Rasulullah yang dapat membersihkan dan menghapus dosa mereka, sehingga ketika Rasulullah wafat mereka beranggapan terbebas dari zakat, pembangkangan ini dipelopori oleh Musailamah al-Kadzab dari Yamamah.

Para pembangkang oleh khalifah Abu Bakar dinilai telah murtad, dan dinyatakan perang kepada mereka mengingat zakat sejajar dengan shalat sehingga zakat harus ditunaikan, disinilah letak ketegasan Abu Bakar dalam menegakkan syariat Islam. Selain dari itu pada periode abu Bakar juga didirikan Baitul Maal di San'ah yang terletak didataran tinggi Madinah, ia tidak mengangkat pengawal untuk mengawasi baitul maal dan ketika ditanya beliau menjawab "jangan takut, tidak ada sedikitpun harta yang tersisa di dalamnya, semuanya telah habis dibagikan".¹⁴

Sepeninggal Abu Bakar, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab situasi jazirah Arab relatif stabil dan tentram, bahkan semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Berbeda dengan khalifah Abu Bakar dalam pengelolaan zakat, Umar bin Khattab melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam dinamika pemerintahan yang sangat kompleks, khalifah Umar bin Khattab membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk lembaga baru yang bersifat eksekutif operasional, diantaranya Baitul Maal sebagai lembaga yang

berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat.

Sebagai sistem kontrol Umar menetapkan satu tahun anggaran 360 hari, dan menjadi tanggungjawab khalifah Umar untuk membersihkan baitul maal dalam setiap tahun satu hari, dan adalah Umar yang memiliki pola hidup zuhud sehingga ia tidak terpengaruh oleh kemewahan harta, meskipun pada masa kekhalifahannya harta berlimpah ruah karena banyak negeri yang takluk di bawah kekhalifahan Umar. Tidak sampai disitu ternyata ada implementasi zakat yang menarik, karena pada periode Umar hak zakat bagi mu'allaf ditarik, seperti terjadi pada Uyainah bin Hishn, Aqra bin Habis dll, mereka pada masa nabi menerima zakat sebagai muallaf.

Ditariknya hak zakat muallaf menurut khalifah Umar memang pada saat tertentu dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar menerima Islam dengan memberi tunjangan, tetapi bila mu'allaf telah diberi cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka tunjangan tersebut dapat dicabut kembali dan diberikan kepada yang berhak menerimanya,¹⁵

Zakat pada periode Umar dijadikan sebagai upaya membangun peradapan politik yang tidak diskriminatif dan memberikan suatu kecukupan, sehingga orang merasa berkecukupan, seperti zakat yang diberikan Umar kepada wanita Badui, Umar memberikan wanita itu seekor onta yang membawa tepung dan minyak lalu disusul dengan dua ekor unta lainnya.¹⁶

Pengelolaan zakat pada periode Utsman bin Affan merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan Umar. Pada periode Utsman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan pada periode Utsman harta kharaz (retribusi atas tanah yang dikuasai Negara) dan jizyah (pungutan yang dikenakan atas warga non muslim) harus juga dikeluarkan zakatnya. Pada periode Utsman ini pula harta pengelolaan zakat mencapai tingkat tertinggi.

Karena berlimpahnya harta pengumpulan zakat, dan bertambah luasnya wilayah Islam dan semakin tidak terjangkau oleh aparat birokrasi hingga ada sinyalemen bahwa pengelolaan zakat tidak sepenuhnya berjalan. Sementara itu sumber pendapatan Negara dari kharaj dan jizyah cukup memadai.

Pada periode Ali pengelolaan zakat mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan khalifah Ali sangat hati-hati dalam mengelola dana hasil zakat, harta yang ada di baitul maal selalu didistribusikan untuk kepentingan umat, ia tidak pernah mengambil untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Sampai pada suatu saat saudara Ali bernama Aqil meminta bagian dari baitul maal, namun Ali menolak dan berkata “kamu tidak punya hak atas harta baitul maal, namun bersabarlah hingga saya bisa mengumpulkan harta yang banyak, niscaya engkau akan kuberi bagian”,¹⁷ Demikianlah gambaran begitu teguh dan berhati-hatinya khalifah Ali dalam mengelola zakat.

4. Zakat Pasca Khulafaurrasyidin

Periode Rasulullah dan khulafaurrasyidin dalam pengendalian pengelolaan zakat menggunakan otoritasnya sebagai pemerintah, tetapi berbeda dengan periode pasca khulafaurrasyidin yang sedikit demi sedikit pengelolaan zakat mulai terlepas dari otoritas pemerintah, periode Rasulullah dan khulafaurrasyidin dalam pengelolaan pemerintah begitu demokratis dan dengan penuh konsistensi pemerintah mengabdikan kepada rakyat terutama pada masyarakat lapisan bawah (*grass root*), sedangkan pemerintahan pasca khulafaurrasyidin dibangun atas dasar kekuatan dan benih-benih feodalisme-nepotisme.¹⁸

Benih-benih feodalisme-nepotisme mulai terlihat pada pemerintahan bani Umaiyah dan Muawiyah, pemerintah membagi-bagikan harta kekayaan dan tanah kepada teman dan pendukung politiknya, pola-pola ini terus diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya, kecuali khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pola yang dikembangkan pada masa ini melahirkan tuan-tuan tanah dilingkungan kerajaan seperti Muawiyah, Abdul Malik al-Walid, Al-hajjaj, Musailamah dan Walid al-Qasri.¹⁹

Dampak dari pola-pola pemerintahan semacam ini, mengakibatkan surutnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam menunaikan zakat dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah, selain itu pemerintah juga menghadapi masalah dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan dan melahirkan keputusan untuk membiarkan masyarakat untuk mengurus sendiri dana zakat, yang dirasakan oleh pemerintah tidak terjangkau lagi dalam sistem dan

administrasi pemerintah. Sedangkan untuk gantinya pemerintah memusatkan perhatian pada pendapatan Negara berupa *kharaj* (retribusi atas tanah yang dikuasai Negara) dan *Jizyah* (pungutan yang dikenakan atas warga Negara non muslim), dengan pertimbangan secara ekonomis lebih memadai dan secara politis lebih mudah.²⁰

Pendapatan Negara yang bersumber dari dana non-zakat, seperti tergambar pada masa khalifah Al-Mukmin, pendapatan non-zakat ini berupa; sedekah, jizyah, kharaj, pajak awak kapal dan ikan, pajak tambang galian, pajak barang yang memasuki perbatasan, pajak perniagaan dan pembuatan uang, pajak perdagangan (ekspor), dan pajak pembuatan produk, dengan sumber pajak terbesar dari kharaj.

5. Zakat di Indonesia

Sumber-sumber keuangan umat Islam di Indonesia dikenal dengan zakat, wakaf, sedekah, infak dan hibah. Sumber keuangan ini begitu besar manfaatnya, seperti terlihat pada perang Aceh yang besar dan berkepanjangan melawan Belanda, dalam peperangan rakyat Aceh ditopang oleh pendanaan yang bersumber dari hasil keuangan umat Islam yang terkumpul di pusat-pusat pengelolaan, seperti masjid, surau atau langgar, bahkan dalam pendirian sarana ibadah tersebut diperoleh dari tanah wakaf sedangkan pembangunannya bersumber dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah maupun hibah.

Sebelum masa penjajahan kejayaan kesultanan yang ada di Indonesia juga ditopang oleh dana internal umat

Islam, seperti kesultanan Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Goa dan Ternate, kesultanan-kesultanan tersebut tercatat mampu memperbaiki potensi ekonomi umat dengan cara memperbaiki kualitas ekonomi rakyat dengan mengatur sumber keuangan Islam, berupa pendaya gunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak dan sedekah.²¹ Pada masa kolonial sumber-sumber keuangan umat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya baik pada kolonial Belanda maupun Jepang, ini dikarenakan sumber-sumber keuangan Islam seperti kas-kas masjid tidak sepenuhnya dikelola oleh umat Islam, tetapi dimanfaatkan oleh koloni, diantaranya untuk menyumbang rumah sakit zinding di Mojowarno, dan ada juga kas masjid yang digunakan untuk membiayai sebuah asrama pelacuran.²² Sampai setelah kemerdekaan sumber-sumber keuangan umat belum dapat terorganisir dengan baik.

Besarnya potensi dan manfaat sumber keuangan Islam, mendorong ulama besar Muhammad Arsyad Al-Banjari menggulirkan gagasan yang brilian mengenai zakat. Menurutnya zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahik, zakat yang bersifat konsumtif tidak mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Potensi dan manfaat keuangan Islam di Indonesia baru mendapat perhatian kembali pada masa orde baru, tanggal 15 juli 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) dan pembentukan

Baitul Maal (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat sebagai ibadah harta memiliki makna ganda transcendental dan horizontal, selain memiliki nilai ibadah kepada Allah juga bernilai membangun tatanan sosial kemasyarakatan. Zakat begitu berarti dalam kehidupan dan memiliki banyak hikmah serta manfaat dalam pemanfaatan nilai harta umat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), dan masyarakat umum.

Hikmah bagi orang yang berzakat; *pertama*, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir yang ada dalam diri (jiwa) serta melatih diri dalam memiliki sifat-sifat kedermawanan. *kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentraman. *ketiga*, mengembangkan harta benda, baik dari sisi spiritual maupun sisi ekonomis-psikologis.²³ dan Amiruddin Inoed, dkk²⁴ secara khusus mengatakan hikmah zakat bagi muzakki adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak), menanamkan cinta kasih terhadap golongan yang lemah, mengembangkan rasa dan semangat kesetia kawatan dan kepedulian sosial, membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (mustahik) dan merupakan perintah Allah, menumbuhkan kekayaan si pemilik jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah

tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas, dan terhindar dari ancaman Allah dari siksa yang pedih.

Hikmah bagi mustahik adalah menghilangkan perasaan sakit hati, iri, dengki dan dendam terhadap si kaya yang hidup berkecukupan tetapi tidak peduli pada masyarakat bawah (*grass root*), menumbuhkan dan menumbuhkan rasa syukur serta simpati dan partisipasi si kaya terhadap kaum *dhuafa*, menjadi modal kerja untuk berusaha dan berupaya mengangkat harkat hidup. Sedangkan hikmah zakat bagi umum (pemerintah) adalah menunjang keberhasilan program pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan umat, dan member solusi aktif dalam meneratas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, zakat merupakan hak mustahik (menolong, membantu, membina, terutama fakir miskin supaya lebih sejahtera), sebagai pilar amal bersama (*jama'i*), sebagai sumber dan pembangunan sarana dan prasarana umat (*sabilillah*), sosialisasi etika bisnis yang benar, dan sarana pembangunan kesejahteraan umat.²⁵

Sedangkan Yusuf Qaradhawi, mengatakan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan dalam mengatasi pelbagai permasalahan sosial-ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, harta karun dan penimbunan harta.²⁶

Hikmah dan manfaat tersebut sejalan dengan firman Allah SWT, (QS al-Baqarah, 2:276-277) :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan *الصلوات*. Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Beberapa pendapat tentang hikmah dan manfaat zakat di atas, secara garis besar mencakup hikmah dan manfaat sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan harta tidak mutlak.
3. Menumbuhkan kesadaran bahwa harta sebagai nikmat Allah merupakan sarana pembangunan sistem sosial dan ekonomi umat.

Manajemen Kelembagaan Zakat

Penanganan pengelolaan zakat acap kali dilakukan secara tradisional, zakat infak dan sedekah cukup diserahkan muzzaki langsung ke mustahik, atau diserahkan kepada guru ngaji dan kiyai, tetapi pola ini sedikit demi sedikit telah bergeser. Dalam pengelolaan zakat mulai diserahkan kepada yayasan atau lembaga yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah, meskipun masih menjadi pertanyaan mengingat sukses atau tidaknya manajemen kelembagaan zakat dalam merealisasikan maksud dan tujuan zakat akan berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Manajemen kelembagaan zakat tentunya tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen, yang akan turut menopang terealisasinya maksud dan tujuan zakat. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan (*planning*), mengorganisir (*organizing*), memimpin (*leading*) dan mengawasi (*controlling*).

Table. 1 Fungsi Manajemen

Merencanakan (<i>planning</i>)	Mengorganisir (<i>organizing</i>)	Memimpin (<i>leading</i>)	Mengawasi (<i>Controlling</i>)	Pencapaian tujuan
1. Menetapkan sasaran 2. merumuskan tujuan 3. menetapkan strategi 4. mengembangkan sub rencana untuk mengkoordinasikan	1. Menetapkan apa yang perlu dilaksanakan 2. Cara pelaksanaannya 3. Siapa yang melaksanakan	Mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan mengarahkan pertentangan	Memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan	

1. Perencanaan Kelembagaan Zakat

Setiap organisasi/lembaga baik formal atau non formal, dalam setiap aktivitasnya guna mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari perencanaan, meskipun bagi organisasi non formal perencanaan acap kali tidak tertulis. Perencanaan secara umum mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi dalam mencapai sasaran, menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.²⁷

Perencanaan akan membantu kita dalam memberi arah kepada pemimpin, manajer, amil dan juga karyawan, kemana sesungguhnya arah organisasi (BAZIS/LAZIS) dan apa yang harus mereka sembangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dan bekerjasama satu dengan yang lain dalam tim. Perencanaan juga diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan, pemimpin atau amil dituntut agar lebih visioner dalam mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan dan menyusun tanggapan-tanggapan yang tepat atas perubahan yang terjadi, sehingga jelas tindakan-tindakan yang dilakukan.

Perencanaan yang baik dan tepat dapat memperkecil pemborosan dan kelebihan, menghindari kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, ketidak efisienan dapat dikoreksi dan dihilangkan dan pada akhirnya perencanaan dapat menentukan sasaran-sasaran atau standar yang digunakan dalam pengendalian.

Melalui perencanaan yang baik akan mengantarkan pada usaha pencapaian maksud dan tujuan zakat, Yusuf Qaradhaw²⁸ mengatakan akan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat muslim, juga dalam menyelesaikan problematika kemasyarakatan, mengentaskan kemiskinan, kelemahan materi dan psikis, member jaminan sosial, membangun kebersamaan, dapat menjauhkan diri dari kedengkian dan kebencian serta mampu membuat suatu perbaikan yang terarah.

2. Pengorganisasian Zakat

Pengorganisasian sebagai sebuah proses menciptakan struktur organisasi, proses pengorganisasian ini penting guna mempermudah pelayanan terhadap tujuan organisasi. Pengorganisasian memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- + Membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam departemen-departemen dan jabatan-jabatan yang terperinci.
- + Membagi-bagi tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan.
- + Mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi.
- + Mengelompokkan pekerjaan kedalam unit-unit
- + Membangun hubungan di kalangan individu, kelompok dan departemen
- + Menetapkan garis-garis wewenang formal
- + Mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi.

Struktur organisasi sebagai kerangka kerja formal, digunakan untuk membagi-bagi tugas dalam jabatan,

mengelompokkan dan dikoordinasikan. Dengan struktur organisasi akan dapat diketahui bentuk dari organisasi tersebut. Struktur organisasi juga menggambarkan desain pekerjaan yang mengacu pada proses yang digunakan dalam merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu.

Mendesain struktur organisasi berarti melakukan tindakan yang terdiri dari membuat keputusan dan tindakan manajer itu sendiri yang diharapkan nantinya akan menghasilkan struktur organisasi yang khas, proses pendesainan ini disebut desain organisasi.

Struktur sebuah organisasi memiliki enam unsur penting, yaitu:

1. Spesialis kerja, tingkat dimana tugas-tugas dalam suatu organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah (pembagian kerja/*job spec*)
2. Departementalisasi, landasan yang digunakan untuk mengelompokkan tugas dan pekerjaan dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
3. Rantai komando, sebuah garis wewenang yang tak terputus membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat bawah, dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa, serta tanpa melepaskan wewenang, tanggungjawab dan kesatuan komando.
4. Rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif.

5. Sentralisasi, kadar sampai dimana pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat-tingkat atas organisasi tersebut.
6. Desentralisasi, pengoperan wewenang membuat keputusan ketingkat yang lebih rendah dibawahnya.
7. Formalistik, sejauhmana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan dan sejauhmana tingkah laku karyawan dibimbing oleh peraturan dan prosedur.

Unsur-unsur organisasi tersebut menjadikan ciri dari sebuah organisasi, apakah organisasi itu kaku dan sangat ketat kendalinya (organisasi mekanik) atau organisasi yang fleksibel dan mudah beradaptasi (organisasi organik).

Tabel. 2 Perbedaan Organisasi Mekanistik dan Organik

Mekanistik	Organik
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spesialisasi tinggi ▪ Departementalisasi kaku ▪ Rantai komando jelas ▪ Rentang kendali sempit ▪ Sentralisasi ▪ Formalisasi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim lintas fungsional ▪ Tim lintas hirarki ▪ Arus informasi yang bebas ▪ Rentang kendali yang lebar ▪ Desentralisasi ▪ Formalisasi rendah

Struktur organisasi zakat seharusnya juga terkerangka secara formal, tampak jelas pembagian seluruh kegiatan kerja zakat, infak/sedekah, tugas-tugas terkelompokkan, dan terbangun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi dan petugas.

Pengorganisasian kelembagaan zakat dengan baik memungkinkan, terkumpulnya berbagai macam zakat, infak dan sedekah dari masyarakat, terdayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak/sedekah kepada mustahik sesuai dengan hukumnya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran Zakat, infak/sedekah, pembinaan bagi pendayagunaan Zakat, infak/sedekah agar lebih produktif dan terarah, adanya koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infak/sedekah, pengendalian atas pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, tertip ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kepemimpinan Zakat

Kepemimpinan merupakan suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan (*concoersive*) untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan.²⁹ Gary Yukl mengatakan kepemimpinan sebagai proses-proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran,

pemeliharaan hubungan kerjasama dan *teamwork*, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi.³⁰ Kepemimpinan dalam prinsipnya terdapat unsur pengaruh dan pengakuan (legitimasi).

Kepemimpinan zakat disini adalah seluruh mereka yang terlibat dalam pengelolaan zakat (amil). Amil dalam al-Qur'an dikatakan sebagai al-'amiin alaiha – amil yang berarti mengerjakan atau pelaksana. Muhammad Rasyid Ridha dalam menafsirkan surat at-Taubah ayat 60, mengatakan yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh imam/pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *aljubaat*, serta menyimpan / memeliharanya yang dinamai *alhazanah/bendahara*, termasuk petugas administrasi, mereka semua harus terdiri dari orang-orang muslim.³¹

Dari pendapat tersebut maka seorang amil harus diangkat sebagai petugas oleh pemerintah, pendapat ini dilonggarkan oleh sebagian ulama seperti Abu Zahrah dengan pendapatnya : mereka yang bekerja untuk mengelola zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh mustahiqqin serta membagikan kepada mereka.³² Melonggarkan dimaksudkan disini adalah pengorganisasian zakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan tetapi diawasi oleh pemerintah.

Alqardhawi lebih memperinci tentang amil, yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam organisasi kezakatan,

termasuk para penanggungjawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.³³ Masih menurut Alqardhawi pengangkatan amil oleh penguasa atau pelonggaran tersebut merupakan suatu kebijakan yang terpuji, karena di dalamnya mengandung keistimewaan-keistimewaan, yaitu:

- + Jaminan terlaksananya syariat zakat (kecenderungan ada yang menghindar dari kewajiban zakat).
- + Pemerataan (menghindari perolehan dari dua sumber)
- + Memelihara air muka para mustahiqqin (tidak harus bertemu langsung dengan muzakki)
- + Sektor zakat (asnaf yang menerima) tidak harus individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum

Amil sebagai petugas zakat secara umum memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim, Imam Ahmad tidak menetapkan syarat muslim dengan alasan bahwa kata *al'amiin alaiha* bersifat umum, sehingga mencakup muslim dan kafir. Akan tetapi apabila pendapat Imam Ahmad akan diterapkan tentunya bukan dalam pelaksanaan yang mengambil kebijakan.
- b. Aqil Baligh dan terpercaya
- c. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat
- d. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.³⁴

Amil (petugas zakat) secara garis besar memiliki tugas sebagai pengumpul dan pembagi zakat. Tugas sebagai pengumpul diawali dengan mengamati dan menetapkan

para muzzaki, macam-macam harta yang wajib dizakati, besaran jumlah yang harus dikeluarkan (bayar), kemudian mengambil dan menyimpan untuk kemudian diserahkan kepada para pembagi. Para pembagi bertugas melakukan pengamatan dan penelitian secara seksama untuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik), melakukan estimasi terhadap kebutuhan mustahik, mendistribusikan zakat kepada para mustahik dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mustahik masing-masing. Bagi amil yang bertugas sebagai pengumpul harus mengetahui hukum dan kalkulator zakat, sedangkan bagi petugas pembagi harus mengetahui banyak tentang petunjuk agama menyangkut mustahik dan do'a-do'a yang berkaitan dengan tugasnya.³⁵

Kemampuan kepemimpinan/manajerial yang baik dalam melaksanakan tugas keamilan dimungkinkan pengelolaan zakat tidak lagi tradisional-informal, tetapi telah terlembagakan secara formal, sehingga apa yang menjadi hakikat tujuan zakat yakni pengentasan kemiskinan dan kefakiran dapat segera tercapai.

4. Pengawasan Zakat

Pengawasan atau evaluasi (control) adalah proses mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut terlaksana sebagaimana telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang penting.³⁶ Pengawasan terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam (BAZIS/LAZIS) dilaksanakan secara preventif dan represif.

Pengawasan bersifat preventif dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah ditujukan untuk pemeliharaan tertib administrasi (bentuk laporan, formulir, bukti setoran, kartu kendali, pembukuan dan lain-lain) dan keuangan baik dari segi prosedural maupun prosedur operasional dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah. Sedangkan pengawasan bersifat represif, dilakukan apabila terjadi kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus atas dasar pengaduan atau pemeriksaan langsung, temuan ini ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi.

Program pengawasan dapat didasarkan pada kriteria (pedoman dan ukuran keberhasilan program) pelaksanaan zakat, infak/sedekah.

a. Kriteria Pengawasan Zakat

Kriteria keberhasilan dalam program pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat digunakan pedoman berupa:

- Kriteria pendapat, kriteria ini didasarkan pada bagaimana pendapat peserta program tentang kegiatan peengelolaan zakat, infak/sedekah yang dilakukan.
- Kriteria perilaku, dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan kerja, dalam arti kemampuan sebelum program zakat, infak/sedekah berjalan dan setelah program berjalan.
- Kriteria hasil, kriteria hasil dapat dihubungkan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari program pengembangan

baik kualitas maupun kuantitas (berdasarkan standar-standar yang ada).

b. Proses Pengawasan Zakat

Proses pengawasan sedikitnya mencakup tiga kriteria yang tidak terpisah, yaitu mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja, dan tindakan manajerial.

Tabel.3 Proses Pengawasan



-
- ¹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 16.
- ² Sukanto Reksohadiprojo, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, BPFE UGM, 1986, hlm. 15.
- ³ Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, *Manajemen*, (terj. T. Hermaya), Jakarta, PT Prenhallindo, 1999, hlm. 8.
- ⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm.7.
- ⁵ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 323.
- ⁶ Yusuf al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (terj. Setawan Budi Utomo), Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 48.
- ⁷ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/sedekah*, (edt. Hilman dkk), Jakarta, BAZIS DKI, 1999, hlm. 4.
- ⁸ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 5.
- ⁹ Yusuf Al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (terj. Setiawan Budi Utomo), Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 48.
-

-
- ¹⁰ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 7.
- ¹¹ Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Faozan Amar, ed), Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2009, hlm. 9.
- ¹² Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Rohmansyah Harul dan Mursyid (ed), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 14.
- ¹³ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 73.
- ¹⁴ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 75.
- ¹⁵ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 77.
- ¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2005, hlm. 57
- ¹⁷ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 78.
- ¹⁸ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 79.
- ¹⁹ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 79-80.
- ²⁰ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 81.
- ²¹ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 84.
- ²² Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum*, hlm. 85.
- ²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996, hlm. 325.
- ²⁴ Amiruddin Inoed. dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 21-23.
- ²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 9
- ²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, hlm. 2-3.
- ²⁷ Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, hlm. 8.
- ²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, hlm. 90.
- ²⁹ Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi*, terj. Djarkasih, Jakarta, Erlangga, 1996, hlm. 334.
- ³⁰ Gary Yukl, *Leadreship in Organization*, New Jersey, Prentice-Hall Inc, 1994, p. 4.
- ³¹ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Maal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, 1990, hlm. 96.
- ³² IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat*, hlm. 96.
- ³³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 326.
- ³⁴ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat*, hlm. 99.
- ³⁵ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat*, hlm. 99-100.
- ³⁶ Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, hlm.

II. SUMBER DAN MUSTAHIKZAKAT

Sumber Zakat

Harta yang secara mutlak kepemilikannya adalah milik Allah, sementara kepemilikan manusia hanya sekedar mengambil manfaat dari harta tersebut, maka sepatasnyamensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Wujud rasa syukur atas nikmat Allah tersebut dengan cara meng-gunakan dan memanfaatkannya sebaik mungkin, diputar penggunaannya, dikembangkan dan diinfakkan hingga bermanfaat bagi masyarakat.

Islam menganjurkan untuk menghindarkan diri dari penghambaan terhadap harta, menginvestasikan harta untuk mendatangkan keuntungan, menginfakannya hingga dapat bermanfaat bagi individu dan masyarakat, mencela penimbunan harta hingga merusak tatanan fungsi dari harta dalam kehidupan perekonomian masyarakat.¹

Firman Allah SWT:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُمْ شَرُّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَجَلُوا يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Ali Imran, 3 : 180).

Allah SWT secara umum mengatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, Firman Allah SWT:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ إِنَّكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (at-Taubah, 9 : 103)

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (al-Baqarah, 2 : 267).

Ayat di atas memerintahkan untuk menafkahkan atau mengeluarkan zakat (infak) dari sesuatu yang baik diantara harta milik yang kita peroleh dari harta yang halal, baik berujud uang, makanan, buah-buahan, maupun binatang ternak.²Al-Maraghi mengatakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.³

Zakat, infak dan sedekah bersumber dari harta hasil usaha yang baik. Harta adalah alat untuk berbekal dengannya agar kuat bertaqwa dan beribadah, dan terkadang dengan membelanjakannya di jalan akherat.⁴Yusuf al-Qaradhawi mengatakan harta (al-amwal) jamak dari maal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, harta mulanya berarti

emas dan perak, tetapi kemudian segala barang yang disimpan dan dimiliki. Terlebih harta itu tidak hanya yang diinginkan manusia tetapi juga memungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan.⁵

Harta dapat dikatakan selain sebagai suatu yang diinginkan oleh manusia, untuk disimpan, dimiliki dan diperjualbelikan juga memiliki arti dan bernilai saat ini. Harta sebagai sumber zakat, memiliki syarat dikeluarkan zakatnya. Amiruddin Inoed⁶ mengatakan bahwa secara umum kriteria kekayaan wajib zakat, meliputi aspek:

1. Milik orang Islam, merdeka
2. Berkembang
3. Milik Penuh
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Sampai atau cukup senisab
7. Sampai atau cukup waktu
8. Sejumlah kadar tertentu

Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, karena itu hanya diwajibkan bagi orang mukmin dan muslim, berakal dan memiliki harta yang mencapai nisab⁷, Firman Allah SWT:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan (Al-Furqon, 25 : 23).

Dimaksud dengan amal mereka disini ialah amal-amal mereka yang baik-baik yang mereka kerjakan di dunia amal-amal itu tak dibalasi oleh Allah karena mereka tidak beriman, maka harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah milik orang yang beriman.

Didin Hafidhuddin⁸ mengatakan beberapa syarat sumber atau obyek zakat, yaitu:

1. Harta diperoleh dengan cara halal
2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk berkembang
3. Milik penuh (harta dibawah kontrol kekuasaan pemiliknya)
4. Harta mencapai nisab
5. Harta-harta tertentu (emas, perak, perdagangan, peternakan dalam kepemilikan selama satu tahun)
6. Terpenuhinya kebutuhan pokok

Beberapa batasan syarat harta yang dizakati secara umum mengatakan, harta itu haruslah milik orang muslim, beriman, berakal dan halal, harta yang berkembang, kepemilikan harta secara penuh, harta mencapai nisab dan waktu, dan harta telah memenuhi kebutuhan dasar atau pokok. Harta yang dikeluarkan zakatnya didasarkan atas keikhlasan pemilik atas syarat-syaratnya dan atau ditetapkan oleh badan/lembaga zakat dalam penetapnya.

Adapun sumber-sumber zakat adalah segala macam harta dan penghasilan setiap orang. Para ulama menyimpulkan bahwa yang wajib dizakati adalah usaha perdagangan, termasuk di dalamnya usaha jual beli jasa

pelayanan kepada masyarakat, hasil usaha pertanian atau hasil usaha eksplorasi kandungan alam, atau temuan dari dalam bumi, dan harta simpanan, baik dalam bentuk emas dan perak, uang tunai, maupun yang lainnya dengan niat sebagai simpanan.⁹ Lebih spesifik dikatakan sumber zakat adalah Biji-bijian yang megenyangkan, barang dagangan, emas dan perak, Binatang ternak, Buah-buahan, zakat piutang, pakaian, uang kertas dan giral serta deposito bank atau saham, hasil tambang, dan harta rikaz (harta karun).¹⁰

Seiring berkembangnya zaman, bentuk-bentuk usaha juga mengalami pergeseran-pergeseran, sehingga diperlukan kriteria-kriteria penetapan sumber zakat bagi sumber zakat yang masih dianggap baru, sumber zakat ekonomi modern, zakat perusahaan (bukan perorangan), sumber zakat sektor modern. Sektor modern terdiri dari tiga sektor pertanian, industry dan jasa. Beranjak dari sektor tersebut maka sumber zakat dalam perekonomian modern berupa; zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, zakat anggrek, ikan hias, burung wallet dan lain sebagainya, dan zakat aksesoris rumah tangga modern.¹¹

Zakat profesi adalah zakat yang bersumber dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri (seperti; dokter, arsitek, ahli hukum, desainer/perancang, artis/seniman, da'i/mubaligh) maupun secara bersama

(seperti, pegawai pemerintah atau swasta, BUMD, BUMS dan lainnya). Menurut Zamzami Ahmad¹² zakat profesi merupakan penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.

Saat ini sebagian besar perusahaan tidak dikelola secara individual, seperti PT, CV, Persero, dan Koperasi. Perusahaan yang bergerak dibidang produksi, jasa dan keuangan seperti mebel, batu bara, pupuk, obat-obatan dan lainnya, akunting, traveling, kontruksi, pengacara, notaries dan lainnya, bank, pegadaian, koperasi kredit dan lainnya. Hasil perusahaan yang diperoleh secara halal termasuk dalam tijaroh atau dagang yang dikenakan zakat.

Surat-surat berharga yang berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham dan obligasi, saham sebagai surat berharga biasanya menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan obligasi sebagai surat berharga (perjanjian tertulis) yang dikeluarkan oleh perbankan atau pemerintah. atau kata Yusuf al-Qaradhawi saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan dan menunjukkan kepemilikan perusahaan sesuai nilai saham, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah atau pemberian pinjaman kepada bank, perusahaan atau pemerintah.¹³

Perusahaan yang memperdagangkan mata uang ada yang disebut *money changer* atau *al-sharf*, atau juga pasar keuangan (*pasar uang*; jika aktiva dan kewajiban yang diperjual belikan mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun) dan (*pasar modal*; jika jatuh temponya lebih dari

satu tahun).¹⁴ Usaha perdagangan mata uang masuk kategori zakat perusahaan.

Usaha peternakan seperti peternakan kambing, sapi, kerbau dan lainnya ataupun zakat perdagangan termasuk di dalamnya zakat perikanan. Zakat peternakan nisabnya 85 gram emas, dan kadar zakatnya 2.5 persen, untuk zakat perikanan dianalogikan pada perdagangan atau pertanian sebesar 5 *ausaq* atau senilai 653 kg beras atau gandum.¹⁵

Madu dan produk hewani sekarang ini telah dikelola secara modern dengan berbagai hasiatnya dan telah diproduksi dalam bentuk kemasan, dilihat dari perspektif ekonomi modern usaha ini menjanjikan dan menjadi komunitas perdagangan, sehingga sangat wajar apabila juga dikatakan sebagai obyek zakat.

Modal dalam bentuk uang tidak hanya terkonsentrasi pada pengolahan tanah (pertanian) dan perdagangan tetapi telah digunakan untuk pendirian bangunan yang disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi (udara, darat laut) kata Wahbah Zuhailui, sedangkan Yusuf al-Qaradhawi mengistilahkan kegiatan ini *al-musthaghallat* (investasi) baik untuk disewakan ataupun kegiatan produksi dan selanjutnya dijual. Dalam konteks ini ulama mazhab; Hambali, Maliki, ulamak Hadawiyah (mazhab Zaidiyah), Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat harta-harta dalam bentuk investasi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶

Asuransi syari'ah yang berprinsip saling bekerjasama untuk saling membantu, tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa telah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Asuransi syari'ah berprinsip menghindari unsur gharar, judi dan riba. Prinsip ini teraplikasi dalam usahanya dengan azas bagi hasil seperti *mudharabah* (suatu bentuk usaha dimana pemodal dan pengusaha bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama), *murabahah* (suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak), *musyarakah* (suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk memperoleh keuntungan), dan *wadi'ah* (suatu perjanjian simpan menyimpan harta benda berdasarkan prinsip amanah).

Perusahaan asuransi syari'ah merupakan sumber atau obyek zakat, sehingga setiap tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 persen dari total asset (seluruh dana yang dimiliki perusahaan).

Usaha dalam sektor riil semakin berkembang pesat, seperti usaha tanaman hias anggrek, ikan hias, burung walet merupakan usaha-usaha potensial dan juga sebagai sumber penggalan zakat. Usaha dalam sektor ini masuk dalam kategori zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen dengan kadar 5 persen, setelah dikurangi biaya usaha.

Sebagian masyarakat menganut pola hidup mewah dan berlebihan. Monzer Kahf mengatakan barang mewah

ditentukan dari sosiokultural yang ada, Islam tidak menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta, seperti penimbunan harta merupakan suatu kejahatan, penggunaan aksesoris rumah dengan logam-logam mulia (emas dan perak) akibatnya harta yang seharusnya produktif jadi tidak produktif, disebabkan karena logam mulia dijadikan aksesoris rumah tangga. Zakat aksesoris rumah tangga sebesar 2.5 persen setiap tahunnya.

Mustahik Zakat

Mustahik merupakan orang perorangan atau badan yang berhak menerima zakat, bagi golongan penerima zakat telah diatur oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah, 9 : 60).

Firman Allah SWT tersebut yang digunakan sebagai pijakan fiqh dalam menentukan 8 (delapan) golongan orang

yang menerima zakat, dan terbagi dalam dua kategori, yaitu; 4 (empat) golongan utama (*lit-tamlik*) dan 4 (empat) sewaktu-waktu (*ghoiru tamlik*), pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Empat penerima zakat yang utama (*lit-tamlik*), yaitu:
 1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya atau orang yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pokok (makan, pakaian dan perumahan), mereka yang dalam golongan ini berusia produktif diatas 17 tahun.
 2. Orang miskin: orang yang memiliki pekerjaan dan memiliki harta tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum atau tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan, dalam usia produktif diatas 17 tahun.
 3. Pengurus (Amil) zakat: orang (pegawai dan karyawan) yang diberi tugas untuk melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, dengan haknya menerima gaji yang pantas dan memadai sehingga dicapai manajemen pengelolaan yang sehat dan bertanggungjawab.
 4. Muallaf: orang atau golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam dan orang yang baru masuk Islam agar lebih menetapkan hatinya dalam Islam.
- b. Empat penerima zakat yang diberikan sewaktu-waktu (*ghoiru tamlik*), yaitu:

5. Riqob (memerdekakan budak): mencakup juga wanita yang tertipu geromo atau tenaga kerja, juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.¹⁷
6. Gharim (orang berhutang): orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan atau untuk kemaslahatan umat, bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya karena jatuh pailit. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Sabilillah (pada jalan Allah): untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fasilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnussabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya, perjalanan itu demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama.

Dari delapan asnaf tersebut di atas ada yang mempunyai *hak menerima bantuan* untuk memperbaiki sarana umum (lembaga pendidikan dan tempat ibadah), bantuan pendidikan, bantuan modal usaha. *Hak menerima santunan* yaitu kelompok fakir miskin dan kelompok mu'allaf, dan ibnusabil, *hak menerima imbalan* seperti amil.

Mustahik zakat ini bila dilihat dalam persepektif kriteria masyarakat pra-sejahtera di Indonesia yang termasuk mustahik zakat kategori miskin, dengan standar rata-rata sebagai berikut¹⁸:

- a. Penghasilan:
 - + Kota: Rp. 67.000 – Rp. 288.100/KK setiap bulan
 - + Desa: Rp. 55.000 – Rp. 236.500/KK setiap bulan
- b. Keterbatasan kepemilikan: Pakaian 2 – 3 stel
- c. Parameter kelayakan rumah:
 - + Luas < 40 m²
 - + Dinding sederhana bambu atau papan
 - + Kondisi sekitar rumah berdasarkan standar kesehatan
 - + Atap rumah dari rumbia atau non genteng yang telah dipakai selama 20 tahun tanpa perbaikan
- d. Keterbatasan pendidikan :
 - + Tamat SD
 - + Tamat SLTP
- e. Keterbatasan keterampilan produktif:
 - + Keterampilan menjahit
 - + Keterampilan berjualan
 - + Keterampilan bertukang
- f. Kondisi kesehatan:
 - + Makan satu kali sampai dua kali sehari dengan lauk pauk seadanya
 - + Sering terkena serangan penyakit
 - + Relative kurang dapat memenuhi kebutuhan air bersih

- ✚ Umumnya tidak memiliki MCK sendiri
- g. Keterbatasan penghayatan terhadap keagamaan
 - ✚ Tulis baca al-Qur'an
 - ✚ Keikutsertaan dalam pengajian/ceramah agama di masjid dan mushala

Tabel.4 Kriteria Miskin dan Tingkat Konsumsi Makanan Pokok

No	Kriteria	Tingkat konsumsi		Nilai Rupiah (Rp. 2.200/kg)
		Perkapita pedesaan	Perkapita Perkotaan	
1.	Miskin	320 Kg	480 Kg	704.000-1.056.000
2.	Cukup Miskin	240 Kg	360 Kg	528.000-792.000
3.	Miskin Sekali	180 Kg	270 Kg	396.000-594.000

Tabel.5 Kalkulator Zakat

No	Sumber Zakat	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nishab	Kadar*	Waktu	
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	30 – 39	1 /1	Satu tahun	Setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1/1 dan penambahan 40 ekor zakatnya ½
		40 – 49	1/2		
		60 – 69	2/1		
		70 – 79	2/2		
2.	Kambing/domba	40 - 120	1/2	Satu tahun	Setiap penambahan 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor
		121-200	2		
		201-300	3		
3.	Ternak Unggas; ayam, bebek, burung dll	85 gram emas	2.5 %	Satu tahun	

4.	Perusahaan: PT, CV, Perseroan, PD, Firma dll	85 gram emas	2.5 %	Satu tahun	Zakat berdasarkan nilai buku
5.	Perusahaan lowyer, Akuntan, asuransi, reksadana, money chager	85 gram emas	2.5 %	Satu tahun	
No	Sumber Zakat	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nishab	Kadar*	Waktu	
6.	Hasil Pertanian; Buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, damar, kayu dll	653 Kg	5 % sampai 10 %	Setiap panen/ musim	10 % bila pengairannya dari hujan, sungai, mata air, 5 % bila dengan irigasi
7.	Emas, Perak, harta simpanan	Emas 85 gram atau perak 595 gr	2.5 %	Satu tahun	Kepemilikan selama satu tahun
8.	Zakat Profesi (penghasilan)	85 gram emas atau 552 kg beras	2.5 %		
9.	Rezeki tak terduga, undian, kuis	85 gram emas	20 %	Saat mene- rima	Dikurangi biaya dan pajak
10	Barang temuan (rikaz)		20 %	Saat ditemu- kan	Temuan dipublikasi- kan dahulu
11	Zakat Fitrah	Kelebi- han ma- kanan saat Idul Fitri	2.5 kg	Sebe- lum Idul Fitri	

* = 1/1 satu ekor umur satu tahun dan 1/2 satu ekor umur 2 tahun

Contoh Kasus I:

H. Thoat Syari' seorang pengusaha peternakan burung wallet, pada akhir 2009 tutup buku, dengan laporan keuangan sebagai berikut:

Aktiva lancer

1. Produksi sarang wallet ditaksir seharga Rp. 150.000.000	
2. Uang Kas, cek, Bank	Rp. 73.000.000
3. Stok obat-obatan dll	Rp. 7.000.000
4. Piutang Jatuh tempo	Rp. 25.000.000
Jumlah	Rp. 255.000.000

Pasiva lancer

1. Rekening jatuh tempo	Rp. 15.000.000
2. Pajak	Rp. 17.000.000
3. Hutang jatuh tempo	Rp. 9.000.000
Jumlah	Rp. 41.000.000

Aktiva lancer – Pasiva lancer

$$Rp. 255.000.000 - Rp. 41.000.000 = Rp. 214.000.000$$

Nisab zakat ternak walled setara 85 gram emas, jika harga emas murni pergram @ Rp. 210.000, maka $85 \times 210.000 =$ Rp. 17.850.000. Jadi H. Thoat Syari' ternak waletnya telah sampe nisab, yang berarti sudah wajib zakat, maka besaran zakat H. Thoat Syari' adalah $2.5 \% \times 214.000.000 =$ 5.350.000.

Contoh Kasus II:

Nn. Miftah Ridho memiliki beberapa saham, pada PT Duit Syari'ah memiliki 700.000 saham dengan harga nominal per lembar saham Rp. 6.500. Deviden (keuntungan) Rp. 350 per

lembar. Pada PT Langgeng Abadi memiliki 450.000 lembar saham, dengan harga saham per-lembar Rp. 5.000, dan deviden Rp. 200 per lembar.

Maka perhitungan zakatnya:

Nilai saham pada PT Duit Syari'ah : $700.000 \times \text{Rp. } 6.500 = \text{Rp. } 4.550.000.000$, dan deviden $\text{Rp. } 700.000 \times \text{Rp. } 350 = \text{Rp. } 245.000.000$. Nilai Saham pada PT Langgeng Abadi $450.000 \times \text{Rp. } 5.000 = \text{Rp. } 2.250.000.000$ dan deviden $450.000 \times \text{Rp. } 200 = \text{Rp. } 90.000.000$. maka total nilai saham Nn. Miftah Ridho adalah $\text{Rp. } 4.550.000.000 + \text{Rp. } 245.000.000 + \text{Rp. } 2.250.000.000 + \text{Rp. } 90.000.000 = \text{Rp. } 7.135.000.000$.

Jadi zakat yang harus dikeluarkan :

$2.5\% \times \text{Rp. } 7.135.000.000 = \text{Rp. } 178.375.000$.

Kalkulator Zakat Profesi (versi BAZNAZ)

Kalkulator Zakat Profesi Sistem Penghitungan Bulanan (versi Baznaz)			
No.	Uraian	Jumlah Satuan	Jumlah
1.	Total gaji pokok bulanan	9.000.000	
	Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus, lembur, dll)	3.500.000	
	Total Pemasukan		12.500.000
2.	Angsuran Hutang Bulanan	1.500.000	
	Pengeluaran lain seperti pajak	2.000.000	
	Total Pengeluaran		
	Wi'a (total 1 - total 2)		
	Harga Beras/gandum per kg.		

	Sistem penghitungan nisab zakat profesi yang dijadikan pedoman oleh BAZNAS adalah senilai harga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan emas dan perak sebesar 2,5%.	
	Zakat yang harus dikeluarkan = $wi'a' \times 2.5\%$	

Contoh Tabel Zakat Profesi			
No.	Uraian	Jumlah Satuan	Jumlah
1.	Total gaji pokok bulanan	45.000.000	
	Total pemasukan tambahan (tunjangan, bonus, lembur, dll)	5.000.000	
	Total Pemasukan		50.000.000
2.	Angsuran Hutang Bulanan	12.000.000	
	Pengeluaran lain seperti pajak	4.000.000	
	Pelunasan kredit berjangka	10.000.000	
	Total Pengeluaran		26.000.000
	Wi'a' (total 1 - total 2)		24.000.000
	Sistem penghitungan nisab zakat profesi yang dijadikan pedoman oleh BAZNAS adalah senilai harga 524 kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakatnya diqiyaskan		Ya

	dengan emas dan perak sebesar 2,5%.		
	Zakat yang harus dikeluarkan $= wi'a' \times 2.5\%$ $= 24.000.000 \times 2.5\%$		600.000

-
- ¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (terj. Sari Narulita), Jakarta, Zikrul Hakim, 2005, hlm. 83.
- ² Bustami A. Gani, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, UII, 1995, jild.1, hlm. 455.
- ³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm. 15.
- ⁴ Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jakarta, Pustaka Amani, 1986, hlm. 219.
- ⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 16.
- ⁶ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat*, (edt. Suyitno dkk), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 25.
- ⁷ Faozan Amar (edt), *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2009, hlm. 14-15.
- ⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 20-26.
- ⁹ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta, BAZIZ DKI, 1999, hlm. 33.
- ¹⁰ Arifin, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung, IAIN Raden Intan, 1990, hlm. 46-48.
- ¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 92-93.
- ¹² Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh*, hlm. 50.
- ¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 105.
- ¹⁴ Weston & Copeland, *Manajemen Keuangan*, (terj. Jaka Wasana dkk), Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 36.
- ¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 111-112.
- ¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 116-117.
- ¹⁷ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh*, hlm. 38.
- ¹⁸ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh*, hlm. 34-35.

III. PENGELOLAAN ZAKAT

Strategi dan Teknik Pengelolaan Zakat

Lembaga atau Organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran dan target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja.

Agar program kegiatan dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi dijadikan pijakan dalam penyusunan program kerja kedepan (tahun berikutnya).

Pengelolaan lembaga zakat, infak dan sedekah, selain berpijak pada program kerja dan upaya-upaya meminimalisir penyimpangan, lembaga pengelola zakat hendaknya juga memiliki kekuatan hukum formal, dengan adanya kekuatan hukum lembaga zakat akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu; untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan harta zakat dengan skala

prioritas, dan dapat memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.¹

Pengelolaan zakat sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, berinfak dan sedekah bagi muzaki, munfik dan mutasadik dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT demi kebaikan dunia dan akherat, diperlukan menumbuhkan kesadaran, animo dan kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan secara profesional dan jujur.² Atau pengelolaan dengan pilar amanah, professional, dan transparan.³

Profesionalitas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah harus segera menggantikan pola-pola tradisional dengan manajemen modern, melalui perbaikan kelengkapan struktur organisasi, yang secara tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut. Pengelola zakat, infak dan sedekah sebagai proses merencanakan bagaimana cara-cara pengumpulan dan pendistribusian ZIS sampai pada rencana audit pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Kejujuran merupakan modal dalam membangun akuntabilitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah, kejujuran sebagai sifat amanah menjadi jaminan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, infak sedekah. Selain profesional dan kejujuran, transparansi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah menjadi sistem kontrol yang baik, transparansi memudahkan akses bagi

muzaki untuk mengetahui bagaimana dananya dikelola, sehingga menambah kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu:

- ✓ Azas kesadaran umum, azas yang berdampak pada kesadaran menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzaki, munfik dan mutasadik.
- ✓ Azas manfaat, hasil pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat.
- ✓ Azas koordinasi, dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait, agar tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
- ✓ Azas keterpaduan, pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu keterpaduan antara ulama dan umara.
- ✓ Azas produktivitas rasional, dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah diarahkan pada usaha yang produktif rasional.

Pengelola zakat harus mencermati penyebab adanya harta zakat yang dikelola oleh pribadi, ini didasarkan kepada adanya pendapat bahwa harta tidak tetap sulit untuk penghitungan nisab zakatnya. Sementara itu banyak masyarakat yang menggantungkan harapan kepada lembaga zakat untuk tercapainya kemaslahatan. Para ahli fiqh dalam melihat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian, yaitu harta tetap (*current asset*) seperti buah-buahan, hasil pertanian, hewan ternak sapi,

kerbau dan kambing dan harta tidak tetap (*fixed asset*) seperti uang atau barang dagangan.⁴

Pendistribusian harta zakat oleh perorangan dengan alasan apapun tidak dibenarkan, didasarkan pada pendapat para ulama bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin (amil zakat) yang ada disuatu daerah atau wilayah tertentu, juga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang dan barang dagangan dilakukan oleh pemimpin (amil zakat).

Pengumpulan Zakat

Harus disadari bahwa masih banyak sumber-sumber keuangan Islam dari zakat, infak dan sedekah yang belum tergali, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan sumber keuangan Islam ini sebagai salah satu alat dalam pengentasan kemiskinan dan sarana ukhuwah antara si mampu dan si papa yang sampai kini masih belum dapat terwujud.

Guna menjadikan zakat, infak dan sedekah dan sumber-sumber lainnya dapat benar-benar sebagai pilar pengentasan kemiskinan, perlu diikhtiar berbagai upaya guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran muzaki, munfik dan mutasadik, ikhtiar ini dapat berupa:

- Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infak dan sedekah baik dari

segi pengertian, hikmah, dan tujuan dari zakat, infak dan sedekah.

- Manfaat (*benefit*) serta kebutuhan/hajat (*need*) dari zakat, infak dan sedekah bagi yang muzaki maupun mustahik.⁵

Ikhtiar tersebut dapat juga ditunjang oleh *qudwah* (tauladan) dari pemimpin suatu daerah/wilayah, *qudwah* ini juga tentunya harus melekat pada pengurus (amil) zakat dalam kejujuran dan amanah pengurus serta perlu dilakukannya sosialisasi zakat.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah adalah:

- a. Pemimpin (Umara), tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat bersama-sama mengeluarkan seruan tentang gerakan zakat, infak dan sedekah.
- b. Pemimpin mengajak tingkat dibawahnya serta instansi terkait untuk menanamkan kesadaran dan ketaqwaan dalam ber-zakat.
- c. Menggiatkan berdirinya Badan/Lembaga zakat, infak dan sedekah pada tiap tingkatan.
- d. Hasil pengumpulan zakat hendaknya tersetukan dan disimpan pada lembaga keuangan yang *accountable*.

Pengumpulan zakat dengan barbagai upayanya sesungguhnya bermaksud dan bertujuan membangun tatanan kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan di masyarakat menjadi kesenjangan sosial, dengan kata lain target minimal realisasi zakat dapat

melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai setandar kehidupan yang sesuai, dan tidak memiliki makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Sedangkan target maksimal dari pengumpulan zakat untuk meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan berkecukupan.

Secara teknis pengumpulan dapat dilakukan dengan:

1. Amil membagikan kupon beserta formulir-formulir zakat, infak dan sedekah kepada unit/satuan Kerja berdasarkan usulan masing-masing, sampai ketinggian paling rendah.
2. Amil melayani muzaki, munfik dan musadik yang datang ingin menunaikan ibadah ZIS (Stelsel pasif).
3. Amil mendatangi muzaki, munfik dan mutasadik untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka untuk ber-ZIS (stelsel aktif).

Administrasi Zakat

Adiministrasi yang bertanggungjawab (*accountable*) turut menjadi piranti kesuksesan zakat, dan tidak hanya bertanggungjawab tetapi juga mereka yang professional. Unsur-unsur administrasi yang *accountable* menurut Yusuf Qaradhawi⁶, adalah:

1. Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat.
2. Menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administratif.

Standar bagi SDM yang akan duduk pada lembaga zakat, yaitu: orang muslim, kapabel dalam bertugas, dan mengetahui peran dalam tugasnya atau satandar SDM adalah mampu dan amanah. Firman Allah SWT:

... إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

... Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (QS. Al-Qashas, 28 : 26).

Amanah dalam menjalankan pekerjaan disertai kemampuan, juga dinyatakan dalam firman Allah SWT:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (QS. Yusuf, 12 : 55).

SDM yang memiliki kemampuan tentunya lebih mampu dalam bekerja, menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan. Kemudian SDM yang amanah dalam melak-sanakan tugasnya selalu menjaga kepercayaan terutama terkait dengan masalah keuangan.

Tugas SDM yang terkait dengan masalah keuangan akan mengelincirkan apabila diserahkan kepada orang yang tidak berkepribadian. Harta/Uang terkadang mampu meruntuhkan tatanan keimanan saat berada didepan mata, SDM yang kurang baik akan memberikan gambaran yang buruk terhadap manajemen zakat. Untuk itu dalam menentukan orang-orang yang akan duduk pada

kelembagaan zakat harus benar-benar dilakukan secara selektif dan ekstra hati-hati.

Petugas zakat selain memiliki kemampuan dan amanah, juga hendaknya memiliki sifat *afif* (menjauhkan diri dari sikap tercela) yang tidak mengulurkan tangannya untuk menerima yang bukan haknya, karena zakat diperuntukkan kepada fakir miskin dan mustahik lainnya. Petugas zakat telah memiliki honor atas pekerjaannya yang telah ditetapkan, maka jika mereka melihat uang zakat dan mengambilnya maka sesungguhnya telah memakan hak fakir miskin dan hak orang-orang yang lebih membutuhkan.

Administrasi zakat yang baik adalah dengan mempermudah dan juga hemat dalam pengeluaran administrasi sebaik mungkin, dalam arti untuk menjauhi masalah dan juga beban serta memperkecil semua biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan demi mencapai tujuan yang di targetkan dengan efektif dan efisien.

Karena uang zakat, infak dan sedekah merupakan amanah umat yang bernilai ibadah, maka pengurus wajib mempertanggungjawabkan administrasi kegiatan dimaksud untuk itu perlu adanya kontrol secara intensif terhadap pengadministrasian terutama pengelolaan keuangan.

Beberapa contoh⁷ tertib administrasi dalam hal penyiapan formulir-formulir laporan rekapitulasi hasil pengumpulan ZIS, penerimaan dan penyetoran ZIS, formulir dank kupon infak/sedekah, registrasi penyetoran berita acara pengelolaan ZIS dll:

TANDA TERIMA PEMBAYARAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Dengan mencari ridha Allah SWT, telah kami terima zakat/
infak/sedekah dari Bapak/Ibu/Saudara:

N a m a :
Alamat :
Besarnya :
Terbilang :

.....,
Amil Zakat, Infak dan Sedekah
Ketua Harian,

(.....)

Badan/Lembaga Amil Zakat
 Infak dan sedekah
 Jl. Jendral Surya zakah No. 8 asnaf

DAFTAR PENYETORAN

No	Tanggal Terima	Uraian	Jumlah Uang	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				
Jumlah			

Ketua Badan/Lembaga Zakat...,

.....

Badan/Lembaga Amil Zakat
Infak dan sedekah
Jl. Jendral Surya zakah No. 8 asnaf

BUKTI PENERIMAAN SETORAN

Dari: Kelurahan Kode
Kecamatan Kode
Kelurahan/Unit Kode

Banyaknya Formulir disetor	Nomor Formulir	Jumlah uang disetor
		Jumlah Kotor: Rp. Potongan: Rp.

Jumlah bersih yang disetor:

Terbilang:

.....,

Badan/Lembaga Zakat

Yang Menyetor,

Yang Menerima,

.....

.....

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian yang *accountable* menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan kemasyarakatan, sehingga benar-benar mencapai pada orang yang membutuhkan. Firman Allah SWT:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
وَإِنْ لَّمْ يَرْضَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Dan di antara mereka ada orang yang mencelembu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah (QS. At Taubah, 9 : 58).

Allah SWT juga telah memberi batasan yang jelas tentang distribusi zakat, sebagaimana Firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah, 9 : 60).

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah. Seperti terdapat dalam surat at Taubah di atas, mustahik terdiri dari 8 asnaf (golongan), yaitu:

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokok (makan, pakaian dan perumahan);
2. Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan minimum bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor dan menyalurkan kepada mustahiknya;
4. Muallaf ialah orang/golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam;
5. Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
6. Gorim ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;

7. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;
8. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melintas dari satu daerah ke daerah lain dan bukan untuk maksud maksiat, tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Kedelapan asnaf tersebut mempunyai hak yang berbeda, ada yang menerima *hak bantuan*, ada yang menerima *hak santunan* dan ada pula yang menerima *hak imbalan*. Ada juga golongan yang menerima hak santunan dan sekaligus menerima hak bantuan, yaitu fakir-miskin. Harta zakat, infak dan sedekah untuk keperluan konsumtif, seperti untuk membeli makanan dan pakaian mustahik menerima hak santunan. Tetapi bagi fakir-miskin yang ingin berusaha untuk berusaha mandiri, dan karena itu kepadanya diberikan modal usaha, berarti dia menerima bantuan. Khusus bagi amil, mereka adalah menerima hak imbalan. Karena tugas amil memungut atau mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, maka wajarlah apabila kepada mereka diberikan imbalan (balas jasa atas tugas-tugasnya).

Secara umum pendistribusian zakat dapat bersifat konsumtif, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bersifat produktif, digunakan untuk kegiatan usaha dalam hal ini penambahan modal usaha.

Yusuf al-Qaradhawi dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif bagi pemerintah Islam, diperbolehkan

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diganti peranan oleh Badan Amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional.⁸

Pendistribusian zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif hendaknya mempertimbangkan unsur-unsur; mendistribusikan kepada seluruh mustahik apabila seluruh sasaran zakat (asnaf) ada dan kebutuhan relative sama, Pendistribusian zakat disesuaikan dengan jumlah masing-masing asnaf dan kebutuhannya, diperbolehkan memberikan semua zakat pada asnaf tertentu jika realitas menuntut demikian dan tidak diwajibkan menyamaratakan, golongan fakir miskin menjadi prioritas pendistribusian zakat, bagian amil zakat tidak lebih dari 1/8 termasuk urusan administrasi, dan bila harta zakat sedikit maka berikan pada satu sasaran saja bahkan untuk satu atau dua individu saja.⁹

Harta zakat yang distribusinya diprioritaskan bagi fakir miskin, tidak serta merta diprioritaskan bagi fakir miskin akan tetapi dalam pemberiannya dengan mempertimbangkan asnaf yang lain, kondisi semacam ini banyak terjadi ditengah masyarakat kita, ketika harta itu didistribusikan dalam bentuk produktif kepada mustahik tak terkecuali bagi fakir miskin harus juga dilakukan pembinaan/pendampingan kepada mustahik agar kegiatan

usaha dapat berjalan dengan baik, dan tetap berusaha agar mustahik selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ke-Islamannya.

Pendistribusian zakat kepada mustahik diutamakan kepada pendistribusian domestik dan pendistribusian yang merata serta perlu membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.¹⁰ Pendistribusian domestik dimaksudkan harta zakat diprioritaskan bagi mustahik yang berada pada lingkungan badan/lembaga zakat, pendistribusian yang merata bukan berarti sama rata melainkan pendistribusian yang berkeadilan diantara semua asnaf yang Allah SWT telah tetapkan sebagai mustahik zakat, adil dengan menjaga kepentingan tiap-tiap penerima zakat dan memberi maslahat bagi dunia Islam.

Membangun kepercayaan disini dimaksudkan tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang meminta atau yang berpenampilan layaknya fakir miskin, ghorim, ibnu sabil maupun mengaku sabilillah, zakat baru bisa diberikan hanya kepada orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang adil yang berada dilingkungan penerima zakat tentang keadaan yang sebenarnya.

Mustahik zakat dapat dikatakan berhak menerima zakat apabila mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

1. Seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.

2. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
3. Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya; orang ini memang miskin, dengan kondisi ini ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.

Persyaratan tersebut merupakan satu batasan antisipasi atas sikap masyarakat yang suka berlebihan bahkan memutar balik fakta, diketahui ada orang yang mampu meminta-minta untuk menjadi miskin (data miskin) sebaliknya ada yang menahan untuk tidak meminta-minta bantuan dikatakan kaya. Kondisi ini bisa dijumpai dari data masyarakat miskin yang tidak *accountable*. Gambaran kondisi kaum fakir miskin dijumpai dalam Firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (òlèh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya

karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (QS. Albaqarah, 2 : 273).

Ayat di atas secara tegas membedakan antara orang yang membutuhkan zakat dan tidak membutuhkan. Pendistribusian zakat sedapat mungkin tidak dilakukan dengan terang-terangan yang berakibat menjatuhkan kehormatan (harga diri mustahik) yang selama ini dijunjungnya.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm. 126.

² Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 43.

³ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat*, (edt. Suyitno dkk), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 144-145.

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (terj. Sari Nurulita), Jakarta, 2005, hlm. 109.

⁵ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat*, hlm. 39.

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, hlm. 123.

⁷ Diambil dari buku, Amiruddin Inoed dkk, *Anatomy Fiqh Zakat* dan sumber lain.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian*, hlm. 134.

⁹ Faozan Amar (edt), *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2009, hlm. 65-67.

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, hlm. 139-152.

IV. PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Perluasan Kewajiban Zakat

Badan/Lembaga menjadi urgen keberadaannya dalam menunjang realisasi zakat, sehingga benar-benar mencapai maksud dan tujuan dari zakat itu sendiri. Upaya realisasi zakat mencakup konsep perluasan kewajiban zakat, artinya setiap harta yang berkembang atau harta yang didayagunakan di dalamnya mempunyai tanggungan kewajiban zakat dan menjadi donasi bagi problematika kemiskinan.

Perluasan kewajiban zakat dengan memperhatikan perkembangan ekonomi modern, tentu tidak terlepas dari kontradiksi bahkan ahli fiqh seperti Ibnu Hazm yang disepakati Syaukani dan Shadiq Khan, mengatakan kewajiban-kewajiban zakat hanya ditujukan pada golongan tertentu saja sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw, yaitu: unta, sapi, kambing, gandum (*syaiir*), kurma, emas dan perak. Ibnu Khaldun mengatakan zabib (kismis), juga hasil perkebunan tidak wajib zakat kecuali gandum dan kurma, demikian juga barang tambang kecuali emas dan perak.¹

Pandangan Ibnu Hazm disandarkan pada dasar yang diyakini, yakni: *pertama*, keharaman harta seorang muslim yang telah ditetapkan oleh nash, artinya tidak boleh mengambil harta yang dimiliki seseorang kecuali ada nash yang menetapkannya. *kedua*, zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i. Qiyas bagi mereka tidak

benar dan haram hukumnya, bahkan pandangan Ibnu Hazm tidak boleh menggunakan hukum qiyas khususnya dalam persoalan zakat.

Namun sebagian ahli fiqh meluaskan batasan kewajiban zakat hingga mencakup semua harta yang dianggap berkembang pada zamannya, di antara yang paling luas menggambarkan kewajiban zakat adalah Abu Hanifah, yang mewajibkan semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya wajib dikeluarkan zakatnya.²

Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut di atas lebih disebabkan pada pola penggalan dasar hukum meski sama-sama disandarkan pada al-Qur'an dan hadits, dalam penggalan sumber zakat dapat digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan ijmal (global) segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat dan pendekatan tafsili (terurai) yang menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya, dengan pendekatan tafsili ini semua harta yang belum ada contohnya pada zaman Rasulullah saw, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya.³

Kegiatan perekonomian modern terkait erat dengan sektor pertanian, industri, dan jasa. Ketiga sektor ini dalam aktivitasnya dapat dilakukan dalam hitungan waktu jam, hari, minggu, bulan dan tahun tergantung pada akad (*flows*), dan ada juga yang dalam kegiatan ekonomi hasil yang diperoleh (hasil kotor) dikurangi keperluan keluarga

atau orang perorang (*stocks/networth*). Aktivitas ekonomi ini dikenakan zakatnya setiap tahun sesuai nisabnya.

Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan (*empowerment*) bertujuan sebagai upaya peningkatan keberdayaan dari yang dirugikan.⁴ Atau dengan kata “daya” berarti *power*, *energy*, dan *capacity*. Daya mengisyaratkan kekuatan atau tenaga untuk menggerakkan. Sementara daya guna berarti daya kerja yang mendatangkan hasil sebanyak-banyaknya dan bermanfaat (*using, efficiency, usefulness*). Dengan demikian program pendayagunaan berarti program yang diberikan (peruntukan) untuk dimanfaatkan secara produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari batasan tersebut, Ahmad Hasan Ridwan mengatakan perlunya tuntutan Kemampuan profesional dalam mendayagunakan dana ZIS, artinya bagaimana upaya mendayagunakan menjadi suatu kenyataan dalam bentuk amal shalih, “...barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya” (Q.S. al-Kahfi:110), sehingga para amil bertindak sebagai orang-orang yang mampu membuat sesuatu menjadi kenyataan (*they, who make thing happened*). Para amil dalam mendayagunakan dana zakat mesti berangkat dari pemikiran *outside in* (dari

luar ke dalam) dari pada pemikiran *inside out* (dari dalam ke luar). Maksudnya langkah strategis pendayagunaan yang dapat dilakukan adalah memulai untuk mengidentifikasi problem mendasar (*problem root*) umat Islam.

Penemuan akar masalah paling tidak dapat dicapai melalui kemampuan diri semacam “radar” untuk melihat trend kebutuhan mendasar masyarakat, yang kemudian diartikulasikan menjadi suatu produk yang mampu memenuhi harapan dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, upaya mendayagunakan dana ZIS mesti melahirkan nilai (*value*) yang bermanfaat yaitu berdaya dan berguna.

Pemberdayaan ZIS yang sangat diharapkan mampu memberikan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat (mustahik), menuntut kemampuan amil zakat untuk mengetahui tiga dimensi pemberdayaan, Kieffer (1981) yaitu: Kompetensi kerakyatan, Kemampuan sosiopolitik dan Kompetensi partisipatif. Kompetensi menurut kamus LOMA (1998), didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah laku. Sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Dari kemampuan ini diharapkan akan melahirkan sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang

menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya-diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, serta Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Proses pemberdayaan ZIS yang harus dilaksanakan oleh amil, mencakup tugas:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi mustahik mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha serta mengidentifikasi kepentingan yang berpengaruh (*significant others*) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat miskin (mustahik), tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada mustahik; harapan dan aspirasi amil ZIS, merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.

5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem kerja amal dan masyarakat mustahik dibentuk, dengan aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat mustahik dan lembaga amal. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat miskin dan amal menjalankan fungsinya masing-masing.

Dengan kata lain amal zakat harus mampu melaksanakan tugas untuk menjadi kekuatan penggerak dalam menyelamatkan ibadah umat dan penggerak untuk meningkatkan kesadaran berzakat, sebagai fasilitator dan ujung tombak penggerak ekonomi sektor real dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil masyarakat bawah melalui perannya sebagai sumber permodalan yang mudah, sehingga ia dapat dijadikan sebagai tempat bagi proses akumulasi modal dari kalangan masyarakat bawah. Dan mampu membangun jaringan (*networking*) baik secara horizontal dengan sesama LAZ dan lembaga-lembaga perekonomian lain maupun secara vertikal dengan menjalin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan lembaga-lembaga yang besar dan mapan, sebagai alternatif bagi pembinaan permodalan, manajemen dan SDM sekaligus berdasarkan prinsip kerjasama saling menguntungkan

-
- ¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (terj. Sari Nurulita), Jakarta, 2005, hlm. 93-94.
- ² Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, hlm. 94
- ³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm.91.
- ⁴ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 130

V. ORGANISASI ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat keberadaannya sangat tergantung kepada lembaga zakat yang mengelolanya. Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga pengelola zakat saat ini tidak hanya dimonopoli oleh BAZIS yang dikelola oleh pemerintah/Negara, tetapi juga dikelola secara swadaya oleh masyarakat (LAZ). Bahkan kecenderungan yang ada masyarakat lebih mempercayai penyaluran zakat mereka kepada lembaga-lembaga amil zakat swasta.

Keberadaan lembaga zakat yang begitu penting, diharapkan bagaimana zakat tersebut dapat berdayaguna untuk meminimalkan, menanggulangi dan mengatasi kemiskinan (perekonomian) umat Islam pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pengelolaan zakat dengan baik akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, infak/sedekah untuka memberdayakan masyarakat lahir dan batin.

Agar tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan zakat¹, infak/sedekah, yaitu:

1. Azas kesadaran umum, artinya pengelolaan zakat member dampak positif terhadap upaya menumbuhkan kesadaran bagi muzaki, munfik, dan mutasadik.
2. Azas manfaat, artinya hasil pengelolaan ZIS member manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat.
3. Azas koordinasi, artinya dalam pengelolaan ZIS hendaknya terjadi koordinasi yang harmonis antara instansi terkait agar tercipta efisiensi dan efektifitas yang optimal.
4. Azas keterpaduan, artinya pengelolaan ZIS perlu keterpaduan antara ulama dan umara.
5. Azas produktifitas rasional, artinya dalam pendayagunaan pengumpulan ZIS diarahkan pada usaha yang produktif rasional bukan sekedar konsumtif.

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah memiliki sasaran seluruh warga muslim, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Masyarakat umum yang dikoordinasikan oleh kepala kelurahan/desa dan dibantu ketua RT/RW serta tokoh agama dan pemuka masyarakat.
2. Karyawan/pegawai yang dikoordinasikan oleh kepala kelurahan/desa, camat, kotamadya/kabupaten dan BAZIS/LAZ setiap tingkatan.
3. Para pengusaha nasional, daerah, dermawan, dan hartawan yang dikoordinasikan oleh BAZIS/LAZ setempat dan pimpinan daerah setempat.

Sasaran zakat yang telah ditentukan siapa muzaki (donasi) zakat pada tiap tingkatan, langkah berikutnya adalah zakat yang terkumpul dikelola sehingga sampai pada mustahik dan tujuan zakat yang diharapkan. Pengelolaan zakat didekati dengan dua pendekatan, pertama memberikan motivasi seperti memberikan pengetahuan tatang manajemen modern, memberikan bimbingan pengetahuan tatang home industry dan kedua, kegiatan yang sifatnya memberikan permodalan berupa uang atau peralatan.² Sedangkan Ahmad Hasan Ridwan mengatakan pengelolaan zakat dapat diupayakan dengan cara sebagai berikut : pertama, Bantuan langsung (BL) yang terdiri dari : bantuan bersifat konsumtif yaitu diberikan bantuan kepada mustahik yang habis dipakai. Bantuan bersifat produktif yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik yang dapat habis dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya. Bantuan tersebut diharapkan dapat merubah posisi mustahik menjadi muzakki dan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Kedua, bantuan tidak langsung (BTL) yaitu bantuan diberikan kepada mustahik dengan kewajiban mengembalikan atau sebagai dana abadi milik pengelola ZIS yang ada pada mustahik. Bantuan tersebut untuk pemberdayaan ekonomi lemah bersifat utang atau penyertaan. Kemudian bantuan diberikan kelompok investasi (penyertaan) yang bersifat murni.

Susunan Organisasi Amil Zakat

Pengorganisasian merupakan proses menciptakan sebuah struktur organisasi, fungsi pengorganisasian mencakup proses menentukan mana tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkat mana keputusan harus diambil.³ pengorganisasian diharapkan dapat mempermudah pelayanan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian memiliki tujuan:

1. Membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam departemen-departemen dan jabatan-jabatan yang terperinci.
2. Membagi-bagi tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan.
3. Mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi.
4. Mengelompokkan pekerjaan dalam unit-unit.
5. Membangun hubungan dikalangan individu, kelompok dan departemen.
6. Menetapkan garis-garis wewenang formal.
7. Mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi.

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas jabatan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Dari struktur organisasi akan tampak bentuk organisasi

tersebut. Struktur juga menggambarkan desain pekerjaan yang mengacu pada proses yang digunakan dalam merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu.

Struktur organisasi amil zakat adalah kerangka kerja formal organisasi BAZIS/LAZIS, yang dengan kerangka kerja tersebut sebagai wadah seluruh kegiatan zakat, infak/sedekah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi dan petugas (amil).

Dengan BAZIS/LAZIS yang baik, tentunya rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan ZIS dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dengan struktur itu pula tugas-tugas yang ada dapat dibagi-bagi dalam tugas-tugas yang lebih terperinci dan diserahkan kepada beberapa orang.

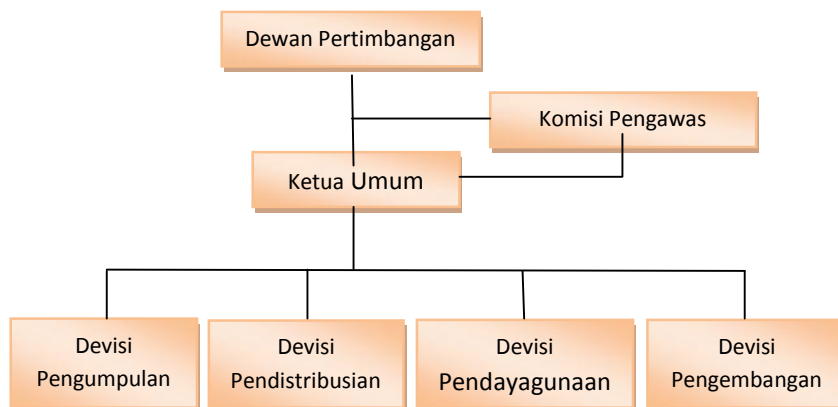
Struktur BAZIS tersusun sebagai berikut:

1. Ketua Umum
2. Ketua Bidang Program
3. Ketua Bidang Jaringan
4. Sekretaris Umum
5. Wakil Sekretaris
6. Bendahara Umum
7. Wakil Bendahara
8. Devisi Pengumpulan
9. Devisi Pendistribusian
10. Devisi Pendayagunaan

11. Devisi Pengembangan
12. Ketua Dewan Pertimbangan
13. Sekretaris Dewan Pertimbangan
14. Anggota Dewan Pertimbangan
15. Ketua Komisi Pengawas
16. Sekretaris Komisi Pengawas
17. Anggota Komisi Pengawas (*Sumber: Baznas*)

Contoh Bagan/Chat:

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah



Pengelolaan, Fungsi dan Tugas Pokok Amil Zakat

Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah adalah Amil, yang berasal dari kata amal berarti “yang mengerjakan atau pelaksana” amal adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh hewon untuk satu tujuan. Rasyid Ridha dalam menafsirkan surat attaubah ayat 60 mengatakan apa yang dimaksud

amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *al-jubat*, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai *al-hazanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang muslim.⁴

Dari pengertian dan pendapat tentang amil tersebut di atas maka seorang amil harus diangkat sebagai petugas oleh pemerintah, meskipun demikian keharusan diangkat oleh imam atau pemerintah di longgarkan oleh Abu zahrah, arti pelonggaran disini pengorganisasian zakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan tetapi yang diawasi oleh pemerintah.

Al-Qardhawi memperinci secara jelas tentang amil zakat, dengan mengatakan “semua orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggungjawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis, dan sebagainya”.⁵ Masih menurut Al-Qardhawi pengangkatan amil oleh penguasa atau pelonggaran tersebut merupakan suatu kebijakan yang terpuji, karena di dalamnya mengandung keistimewaan-keistimewaan, yaitu:

1. Jaminan terlaksananya syariat zakat (berkecenderungan ada yang menghindar bila tidak diawasi pemerintah).
2. Pemerataan (tidak terjadi perolehan dua sumber dan diharapkan semua mustahik memperoleh).

3. Memelihara air muka para mustahik (mustahik tidak harus langsung bertemu dengan muzakki).
4. Sektor (artinya asnaf yang menerima tidak harus individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan sektor ini juga dapat ditangani pemerintah).

Masih dalam sumber yang sama Quraish Shihab menyatakan bahwa para ulama berselisih paham menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang yang diangkat menjadi amil, syarat-syarat tersebut secara umum mencakup:

1. Muslim, Imam Ahmad mengatakan muslim tidak dikatakan sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-'amilin 'alayha* bersifat umum, sehingga mencakup muslim dan kafir. Kalau pendapat Imam Ahmad akan diterapkan tuntutnya bukan dalam hal pelaksanaan yang mengandung kebijakan.
2. Akil baligh dan terpercaya, persyaratan ini disepakati para ulama.
3. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.
4. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Secara umum amil sebagai petugas zakat memiliki tugas sebagai pengumpul dan pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, macam-macam harta yang wajib dizakati, jumlah yang harus dikeluarkan (bayar), mengambil dan menyimpan

untuk kemudian diserahkan kepada para pembagi. Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama siapa saja yang berhak mendapat zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing dengan pertimbangan jumlah yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing. Para petugas pengumpul harus mengetahui banyak tentang petunjuk agama menyangkut mustahik dan do'a-do'a yang berkaitan dengan tugasnya.

Saat ini pengelolaan organisasi zakat telah diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan pedoman teknis pengelolaan zakat nomor D/291/ tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Pembentukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, sesuai keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji dan sesuai dengan tingkatannya (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan) sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Presiden setelah melalui tahapan tahapan sebagai berikut :
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi

- pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan amil Zakat Nasional secara luas kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional sesuai keahliannya.
 - e. Calon pengurus diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan amil Zakat Nasional.
3. Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan integritas tinggi.

Pengurus BAZIS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
 - b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.

- c. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas.
 - d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
2. Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Komisi Pengawas mempunyai tugas :
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menunjuk akuntan publik.
3. Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Badan Pelaksana mempunyai tugas :
- a. Membuat perencanaan kerja yang meliputi rencana pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat.

- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan.
- e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

BAZIS dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat di setiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dengan tujuan untuk melayani muzaki yang menyerahkan zakatnya. UPZ dapat dibentuk di setiap tingkatan pemerintah yang ada, seperti lembaga pemerintah pusat/daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai tingkatannya, dengan prosedur pembentukan:

1. Badan Amil Zakat sesuai pada tingkatannya mengadakan pendataan di berbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas.
2. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat.

3. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan surat keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat.

Unit Pengumpul Zakat bertugas untuk melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.

Berbeda dengan BAZIS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga non pemerintah maka pada institusi ini pengelolaan zakat sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat Pengukuhan dan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah, dan untuk mendapat pengukuhan, lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum)
2. Data Muzakki dan Mustahik
3. Daftar rencana pengurus;
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ;
5. Neraca atau poisisi keuangan;
6. Surat pernyataan siap diaudit.

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah.

Lembaga amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. Mekanisme peninjau ulang terhadap pengukuhan lembaga amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang akan dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.

Motivasi dan Evaluasi Zakat

Motivasi zakat, infak dan sedekah disini merupakan gambaran proses kepemimpinan (amil) dari berbagai tingkatan, untuk mampu memperoleh gambaran yang jelas dari masyarakat, tentang profil kelembagaan, kesadaran

menunaikan ibadah ZIS, tanggungjawab petugas amil, serta kemampuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kepemimpinan (Amil) merupakan faktor yang sangat penting dalam memperoleh prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁶ Gibson, Ivancevich, Donnelly mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan (*concoersive*) untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan tertentu.⁷ Sedangkan Robbins (2001) memberikan definisi kepemimpinan untuk mempengaruhi suatu kearah pencapaian tujuan.

Lebih luas Yukl (2002) mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau organisasi.⁸

Dari definisi kepemimpinan tersebut di atas, maka bila amil kedudukannya sebagai pemimpin pengelolaan zakat, infak dan sedekah berarti juga melakukan aktivitas mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari Bazis/Lazis, dengan mempengaruhi interpretasi masyarakat tentang pemahaman akan ZIS, menumbuhkan motivasi akan

kesadaran pentingnya ZIS bagi muzaki dan mustahik, membangun hubungan antara Bazis/Lazis dengan mustahik zakat, serta membangun dukungan organisasi dan masyarakat akan pentingnya Bazis/Lazis.

Agar amil dapat bekerja secara efisien dan efektif diperlukan kesepemahaman dan kecocokan antara aktivitas amil dengan kesiapan mustahik, sebagaimana dalam teori kepemimpinan situasional (*Contingency*), yang dikatakan bahwa keefektifan kepemimpinan tergantung pada kecocokan antara kepribadian, tugas, kekuasaan, sikap, dan persepsi.⁹ Teori Fred Fiedler yang dikenal dengan *contingency model of leadership effectiveness* yang disebut juga *the least preferred coworker* (LPC) ini, dikembangkan oleh Hersey dan Balnchard menjadi empat perilaku pemimpin yang spesifik yaitu; mengatakan (*telling*), menjual (*selling*), berperan serta (*participating*) dan mendelegasikan (*delegating*). Dengan empat tahap kesiapan pengikut yaitu; tidak mampu dan tidak bersedia, tidak mampu dan bersedia, mampu dan tidak bersedia, mampu dan bersedia.¹⁰

Pengembangan yang dilakukan Hersey dan Balnchard bila di turunkan dalam mengembangkan tugas-tugas amil sebagai pengumpul dan pembagi, maka amil sebagai pemimpin harus mampu membangun hubungan dengan muzaki dan mustahik. Tugas amil dapat mengambil empat bentuk:

1. Amil mengatakan (*telling*), disini amil mendefinisikan perannya dan memberitahukan kepada muzaki dan mustahik mengetahui apa, bagaimana, kapan dan dimana melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, atau amil dapat dikatakan tahap ini bertugas mensosialisasikan dan mengarahkan muzaki dan mustahik.
2. Amil menjual (*selling*) dalam arti mengarahkan dan mendukung agar muzaki melaksanakan kewajibannya dan mustahik menerima akan hak-haknya.
3. Amil berperan serta (*participating*), pada tahapan ini hubungan antara amil, muzaki dan mustahik telah berjalan sebagaimana diharapkan yakni telah sama-sama memahami peran dan tugas masing-masing sehingga amil tinggal terus mempermudah dan membangun komunikasi yang baik.
4. Amil mendelegasikan, tahap ini tugas amil hanya sedikit memberikan sedikit pengarahan dikarenakan muzaki dan mustahik telah sama-sama memahami.

Amil sebagai pemimpin yang bertugas mempengaruhi dan mengerakkan muzaki dan mustahik agar menjalankan tugas dan fungsinya, serta menyadari kondisi riil petugas amil, juga diperlukan kemampuan memotivasi. Motivasi bermakna suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar.¹¹ Sementara Mc Cromick dalam Mangkunegara

(2001)¹² mendefinisikan motivasi sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku-perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Motivasi juga merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menguraikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku.¹³

Dengan demikian motivasi sebagai sesuatu yang mendorong, membangkitkan, mengarahkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan untuk memulai, mengarahkan, dan memelihara perilaku-perilaku di dalam lingkungan kerja.

Amil sebagai petugas pengumpul dan pembagi zakat dituntut untuk mampu mengerakkan perilaku-perilaku kearah tercapainya tujuan zakat, infak dan sedekah. Upaya amil untuk dapat mengerakkan perilaku mencakup perilaku amil sendiri, muzaki, dan mustahik zakat atau mereka yang terlibat dalam lingkungan kerja amil dengan cara:

1. Membangun kepribadian, artinya semua yang terlibat dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah memerlukan cara yang dapat diterima dalam bereaksi dan berinteraksi antar sesama.
2. Pemahaman tugas, artinya amil memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan muzaki dan mustahik juga perlu memahami tugas dan kewajibannya masing-masing.

3. Kekuasaan, artinya amil, muzaki, mustahik menyadari kewenangan yang melekat pada dirinya untuk dijalankan sesuai dengan kewenangannya. Amil memiliki kewenangan mengumpulkan dan membagi, muzaki memiliki kewenangan mengeluarkan zakatnya, dan mustahik zakat memiliki kewenangan menerima haknya.
4. Sikap, amil harus mampu bersikap atau berperilaku yang dapat diterima oleh muzaki maupun mustahik dengan penuh pertimbangan, sehingga arahan-arahan yang disampaikan amil lebih dapat diterima.
5. Persepsi, dalam hal ini amil dituntut memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar dapat memberikan makna bagi lingkungan mereka (muzaki dan mustahik).

Kemampuan menggerakkan atau memotivasi akan mendorong lahirnya; perhatian, umpan balik yang terus menerus, dan perasaan saling membutuhkan antara amil, muzaki, dan mustahik. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan amil memerlukan evaluasi.

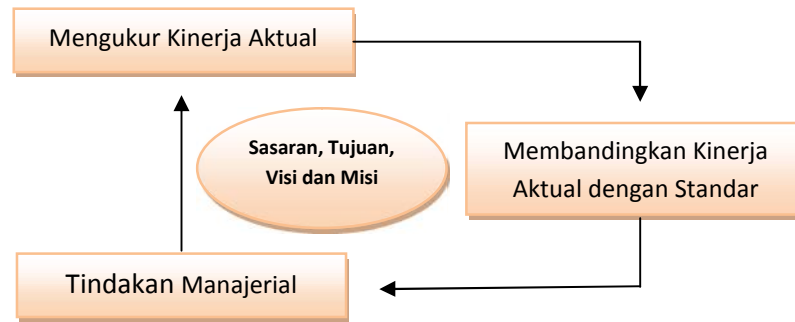
Evaluasi atau pengendalian adalah sebuah proses mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang penting.¹⁴ Pengawasan ZIS dimaksudkan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ZIS (BAZIS/LAZIS) dan pelaksanaan bersifat preventif dan represif.

Pengawasan yang bersifat preventif dalam rangka memelihara tertib administrasi seperti bentuk laporan, formulir, bukti setoran, kartu kendali, pembukuan, keuangan, dan lainnya baik dari segi prosedural maupun segi operasional pengumpulan dan pendayagunaan ZIS. Pengawasan yang bersifat represif dilakukan oleh pengelola atas dasar pengaduan atau pemeriksaan langsung, kemudian hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian sangsi.

Program pengawasan dapat didasarkan pada kriteria (pedoman dan ukuran keberhasilan program) pelaksanaan ZIS. Kriteria keberhasilan pengawasan dalam program pengelolaan ZIS dapat digunakan pedoman:

1. Kriteria pendapat, kriteria ini didasarkan pada bagaimana pendapat peserta program tentang kegiatan pengelolaan dilakukan.
2. Kriteria perilaku, dapat diperoleh dengan menggunakan test keterampilan kerja, dalam arti kemampuan sebelum program berjalan dan setelah program berjalan.
3. Kriteria hasil, kriteria hasil dapat digunakan dengan menghubungkan hasil yang diperoleh dari program-program pengembangan baik kualitas maupun kuantitas (didasarkan standar-standar yang ada).

Proses pengawasan mencakup tiga kriteria yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja, dan tindakan manajerial. (lihat gambar)



¹ Abudin Nata dkk, *Pengelolaan Zakat dan Infak/sedekah*, (edt. Hilman dkk), Jakarta, BAZIS DKI, 1999, hlm. 23-24.

² Suyitno.dkk (edt), *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 137-138.

³ Robbins dan Coulter, *Manajemen*, (penj. T. Hermaya), Jakarta, Prenhallindo, 1999, hal. 11.

⁴ Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1994, hal. 326. Tulisan yang sama juga dapat di baca dalam pengelolaan zakat mal bagian fakir miskin yang diterbitkan IAIN Raden Lampung, 1990.

⁵ Ibid.

⁶ Gitosudarmo dan Sudita, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta, BPFE, 2000, hal. 126.

⁷ Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi; perilaku, struktur dan proses*, Jakarta, Erlangga, 1996, hal. 334.

⁸ Gary Yukl, *Leadership in Organization*, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall, 2002, p. 4.

⁹ Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi; perilaku, struktur dan proses*, Jakarta, Erlangga, 1996, hal. 342.

¹⁰ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, PT Prenhallindo, 2001, hal. 50.

¹¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2001, hlm. 351.

¹² Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 94.

-
- ¹³Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi; perilaku, struktur dan proses*, Jakarta, Erlangga, 1996, hal. 94.
- ¹⁴Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Jakarta, Prenhallindo, 1999, hal. 526